

**ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SUB SEKTOR PERTANIAN  
DI DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 1999**

**SKRIPSI**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Oleh

*Miftakul Ulum*

NIM. 960810101210

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2001**

Asal	: Wardah	Klass	338
Terima	: 7 JUL 2001		ucu
No. Induk	: 10236275		a

## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SUBSEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 1999

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**N a m a** : Miftakul Ulum

**N. I. M.** : 960810101210

**Jurusan** : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

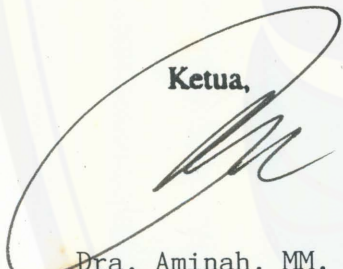
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

5 Mei 2001

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

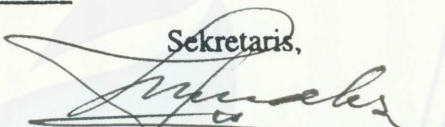
Ketua,

  
Dra. Aminah, MM.

NIP. 130 676 291

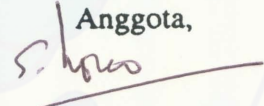


Sekretaris,

  
Drs. H. Ach. Qosyim, MP.

NIP. 130 937 192

Anggota,

  
Drs. Soeyono, MM.


NIP. 131 386 653

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

  
Drs. H. Liakip, SU.

NIP. 130 531 976

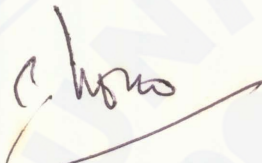




TANDA PERSETUJUAN

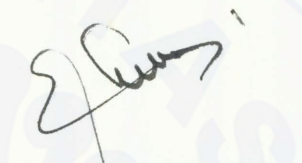
Judul Skripsi : Analisis Penentuan Prioritas Pembangunan Subsektor  
Pertanian Di Kabupaten Jember Tahun 1999  
Nama Mahasiswa : Miftakul Ulum  
N I M : 960810101210  
Jurusan : IESP  
Kosentrasi : Ekonomi Pertanian

Pembimbing I



Drs. Soeyono MM.

Pembimbing II



Drs. EdiSiswandi MP.

Ketua Jurusan

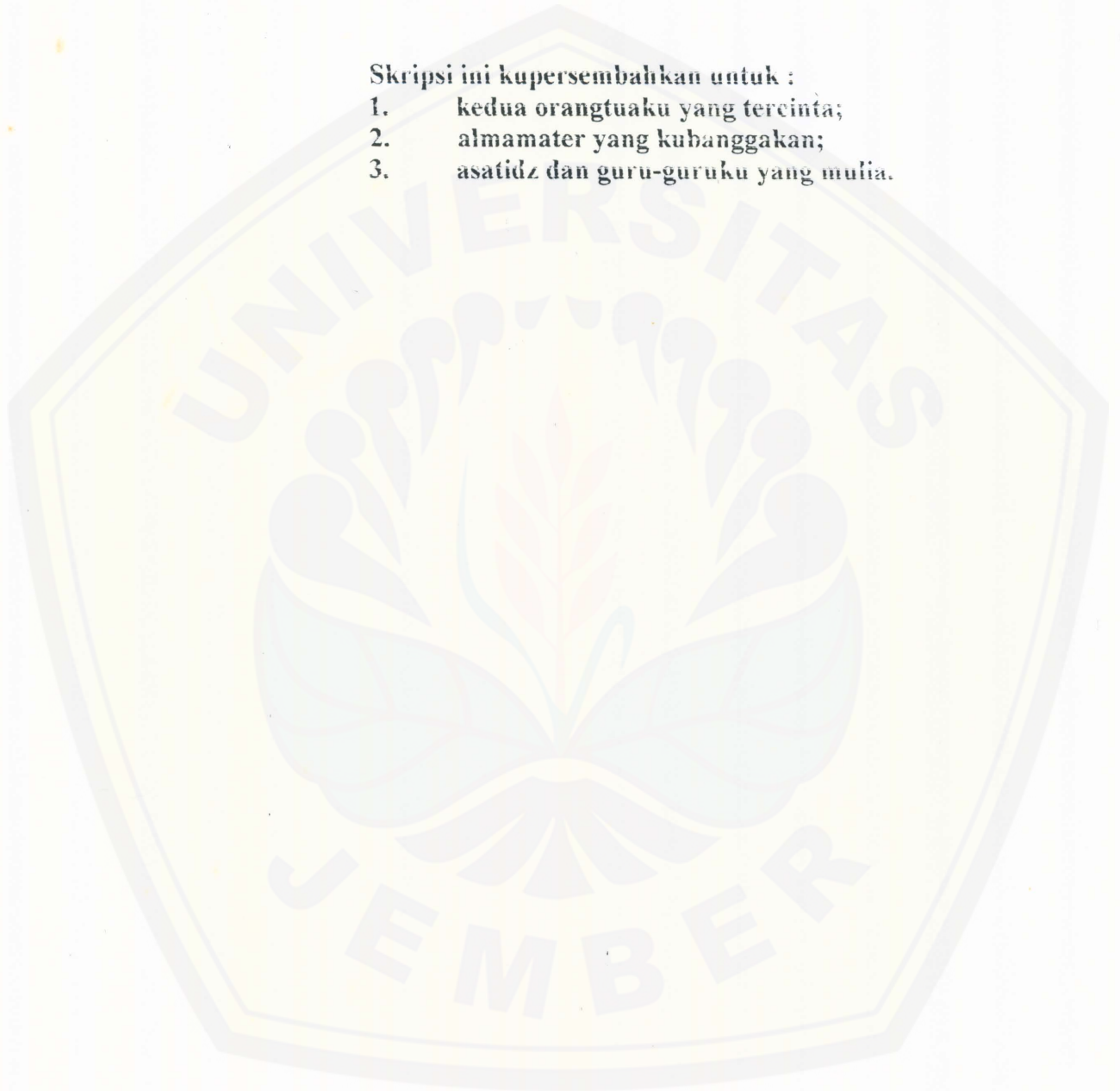


Dra. Aminah MM.  
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 10 April 2001

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. kedua orangtuaku yang tercinta;**
- 2. almamater yang kubanggakan;**
- 3. asatidz dan guru-guruku yang mulia.**





MOTTO

“Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia Kecuali hanya untuk menyembahku”.

(AL-Qur'an)

“Barang siapa Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia ahli agama”. (AL-Hadist)

“Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka semua makhluk yang ada dilangit akan menyayangimu”. (AL-Hadist)

“Keikhlasan adalah bila kau tak membenci ataupun menyukai sesuatu kecuali karena Allah”. (Ulum AL-Faqir)

ءاجهد ولا تكسل فنادمة العقي لمن يتكسل

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, sesungguhnya penyesalan diwaktu yang akan datang adalah bagi orang yang bermalas-malasan”. (AL-Mahfudzot)

ءاهى اءنت مقصودى ورضاك مطلوبى ءاعطى محبتك ومعرفتك

“ Tuhanku tuan adalah tujuanku, ridlomu adalah yang saya cari, berilah daku kecintaan kepadamu dan ma'rifat padamu “. (Do'a)

## ABSTRAKSI

Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan untuk mengetahui subsektor prioritas dan subsektor dominan (dibawah sektor pertanian) yang dipilih untuk lebih dikembangkan diantara kelompok subsektor yang ada dibawah sektor pertanian dalam upaya peningkatan pendapatan regional dan perluasan kesempatan kerja. Penelitian ini mengambil obyek pembangunan sektor pertanian daerah di Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa sektor pertanian di daerah ini mempunyai potensi yang tinggi untuk lebih dikembangkan dalam optimalisasi hasil pembangunan daerah dalam rangka turut mensukseskan pembangunan nasional umumnya dan kemajuan daerah khususnya, dengan waktu penelitian pada tanggal 15-18 Februari 2001.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penentuan basis ekonomi (*basic activity*) daerah dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Locatient Quotient* (DLQ) serta analisis kontribusi sektoral dalam menentukan subsektor prioritas ditahun 1999 dan dimasa datang serta sektor/subsektor dominan dalam pembentukan PDRB sektoral dan total. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif studi kasus.

Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, subsektor peternakan, subsektor perkebunan, dan subsektor perikanan pada tahun 1999 merupakan sektor/subsektor prioritas bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Jember. Sedang hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa hanya subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan yang dapat dijadikan subsektor prioritas bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Jember dimasa datang. Dilain pihak, dari analisis kontribusi sektoral diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB daerah Kabupaten Jember dan subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang dominan dalam pembentukan PDRB sektor pertanian.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penuh keikhlasan penulis panjatkan kehadirat Allah karena dengan limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penulisan skripsi yang berjudul “ ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SUBSEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 1999” tidak dapat penulis selesaikan bila tidak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. bapak Drs Soeyono,MM. dan bapak Drs Edi Siswandi,MP. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. bapak Drs. Liakip,SU. selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta staff edukatif dan administratif Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. segenap pegawai Kantor Statistik Kabupaten Jember dan Propinsi Jawa Timur yang telah banyak memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan;
4. rekan-rekan guru dan para santri PP Dar-El-Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso (bapak Syihab, Jamil, Niman, Syaifuddin, Yusuf, Faizin, Hamdan, Arya, Luthfi, Nurhasan, dan Daris FC) dan PP DAR-El-Fallah Bagorejo Gumukmas Jember (Rokhmuddin, Syaefuddin, Taslim, Munawir, Budi, Khotip, Nurhamim, Amin ) yang tiada lelah dan bo.annya memotivasi dan membantu penuh keikhlasan;
5. rekan-rekan di Sumatera II/16 (Roychan, Widya, Salim, Ari, Basuki, Ali, Hanes, Hari dll) dan rekan-rekan KKN Gel. I 2000 di desa Jambearum Puger (Nurhadi, Naim, Aris, Faisol, Ulfa, Iis, Ike, Enggar, Indayati, dan Bapak dan Ibu Akhwan sekeluarga) serta Barlian Muhammad yang telah membimbing dan menyertai dalam persaudaraan;
6. semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan disini.



# Digital Repository Universitas Jember

Penulis mengharap berbagai kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak sebagai bahan informasi. Amin.

Jember, April 2001

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya .....	6
2.2 Landasan Teori .....	7
2.3 Hipotesis .....	16
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian .....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	17
3.3 Metode Analisis Data .....	17
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran .....	19

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

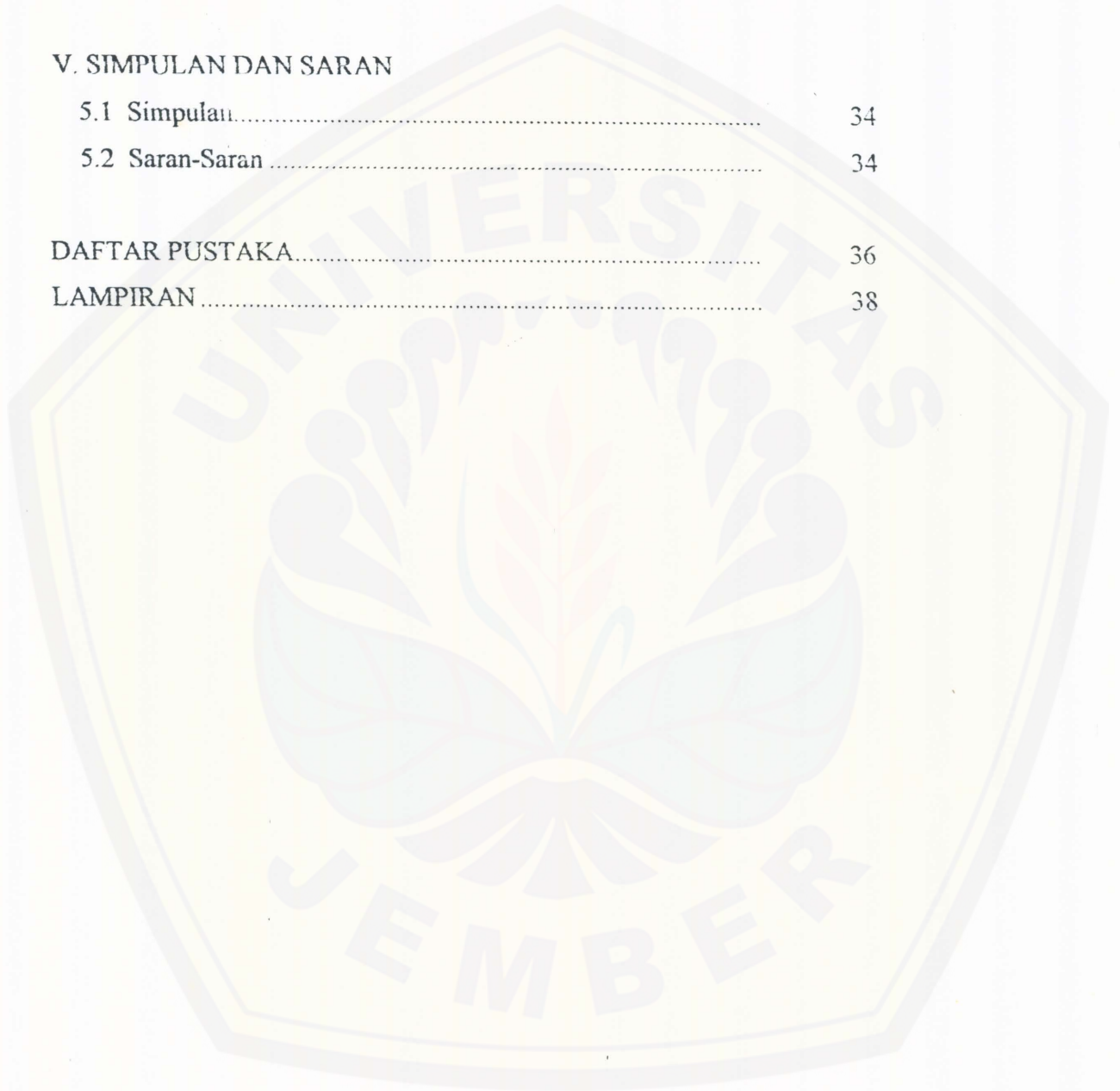
4.1 Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Jember .....	21
4.2 Analisis Data .....	26
4.3 Pembahasan .....	30

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan .....	34
5.2 Saran-Saran .....	34

DAFTAR PUSTAKA .....	36
----------------------	----

LAMPIRAN .....	38
----------------	----





DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja Kabupaten Jember tahun 1999.....	3
2 LQ dan SS Kotamadya Salatiga Terhadap Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-1996.....	7
3 Perbandingan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (tahun 1993) di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1999 .....	22
4 Struktur Perekonomian Wilayah Kabupaten Jember Tahun 1995-1999 .....	23
5 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995 – 1999 .....	24
6 Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999 .....	25
7 LQ dan DLQ Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (tahun 1993) di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1999.....	27
8 Persentase Kontribusi Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999.....	28
9 Persentase Kontribusi Subsektor-Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (tahun 1993) di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999 (dalam jutaan rupiah).....	38
2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan(Tahun 1993) di Propinsi Jawa Timur Tahun 1995-1999 (dalam jutaan rupiah).....	39
3	Perhitungan LQ Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 1993) di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1999 .....	40
4	Persentase Pertumbuhan Tahun Ketahun PDRB Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (tahun 1993) di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999 .....	41
5	Persentase Pertumbuhan Tahun Ketahun PDRB Sektor Pertanian dan Subsektor-Subsektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (tahun 1993) di Propinsi Jawa Timur Tahun 1995-1999 .....	42
6	Perhitungan DLQ Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (tahun 1993) di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1995-1999 .....	43



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Prioritas pembangunan lima tahun ketujuh bertumpu pada pembangunan bidang ekonomi dengan kesepadanan dan keterkaitan antara industri dengan pertanian serta sektor-sektor lainnya. Peningkatan ketangguhan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang mengarah pada agroindustri dan agrobisnis sebagai bagian integral dari usaha nasional yang mengarah pada perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang (Pabelan, 1998:69 ).

Orientasi pembangunan pertanian mengalami perubahan yang mendasar dari orientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis. Reorientasi arah pembangunan pertanian tersebut pada dasarnya adalah rancangan strategis untuk dapat menjawab tantangan masa depan, yang pada hakekatnya merupakan antisipasi terhadap perubahan dalam negeri dan lingkungan global yang berkembang secara cepat dan dinamis (Hasibuan,1999:139). Pembangunan pertanian pada PJP II menghadapi berbagai macam tantangan antara lain yaitu (Dirjen Depdiknas RI, 1993:444) :

- a. globalisasi ekonomi, yang berdampak pada pergeseran dalam hal produksi, konsumsi, dan sistem perdagangan;
- b. kemajuan pesat dibidang teknologi, yang berdampak pada efisiensi dan keunggulan bersaing dari produk pertanian;
- c. pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, menuntut sektor pertanian untuk bisa bersaing dengan sektor-sektor yang lain;
- d. bertambahnya jumlah penduduk, mengharuskan sektor pertanian untuk dapat memenuhi peningkatan kebutuhan pangan penduduk dan ikut menyerap tenaga kerja yang ada;
- e. kondisi sumber daya alam yang semakin menipis dan menurun, baik akibat degradasi kesuburan tanah maupun pengurangan lahan pertanian akibat desakan sektor lain.



Selama masa krisis, sektor pertanian menunjukkan kinerjanya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dibandingkan sektor-sektor lainnya, pertanian mengalami kontraksi yang sangat rendah selama masa krisis dan merupakan sektor yang paling awal bangkit dari krisis (Wibowo, 1999:12). Hal ini membuktikan bahwa daya saing sektor pertanian selama masa krisis meningkat, sehingga sektor ini kembali berperan sebagai katup penyelamat (*Safety Value*) setiap saat perekonomian Indonesia mengalami *down turn* (Putra, 1999:21).

Hambatan dan potensi yang dihadapi pembangunan pertanian diatas menuntut adanya perubahan dalam kebijaksanaan pembangunan pertanian. Pelaksanaan pembangunan pertanian harus memperhatikan aspek kelembagaan pertanian yang tersedia, teknologi, keunggulan produk pertanian, komposisi penduduk, dan sumber daya yang dimiliki. Implikasinya, kebijaksanaan pembangunan pertanian memerlukan pengamatan dan penelitian yang cermat. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki daerah-daerah yang berbeda baik dalam potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi khususnya pertanian. Konsekuensinya, pembangunan pertanian di Indonesia harus didasarkan pada potensi masing-masing daerah dan kebijaksanaan pembangunan pertanian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak harus sama, tetapi menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Hal ini menuntut adanya peranan, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah yang lebih besar, karena merekalah yang lebih tahu tentang permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah pusat melaksanakan otonomi daerah yang diawali dengan pengesahan UU. No. 22 tahun 1999 dan UU. No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Sektor pertanian di Kabupaten Jember merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari distribusi prosentase PDRB Kabupaten Jember menurut lapangan usaha pada tahun 1999, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam

sumbangannya pada PDRB. Sektor pertanian menyumbang RP. 2.296.073,02 juta dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Jember, sekitar 50,32%, bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, seperti industri sumbangannya sebesar 7,62 %, pertambangan 0,33 %, listrik 0,92 %, bangunan 3,38 %, perdagangan 18,74 %, pengangkutan 4,13 %, keuangan 5,49 %, jasa-jasa lain 9,07 %, maka sudah seharusnya sektor ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih dibandingkan dengan sektor lain. Selain itu peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi di Kabupaten Jember menunjukkan kekuatan sektor ini dalam menggerakkan pembangunan utamanya dalam hal ketenaga kerjaan dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja di Kabupaten Jember Tahun 1999

Sektor	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase(%)
Pertanian	328.003	136.249	464.252	46,93
Industri	45.140	55.527	100.667	10,17
Perdagangan	95.171	105.594	200.765	20,29
Jasa-jasa	50.377	44.621	94.998	9,60
Lainnya	113.485	15.227	128.712	13,01
Jumlah	632.176	357.218	989.394	100,00

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Jember, 1999a, diolah, November 2000.

Sektor pertanian di Kabupaten Jember dapat dijadikan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember, hal ini tidak hanya dibuktikan oleh peran sektor pertanian dalam sumbangannya terhadap PDRB dan penyerapan terhadap tenaga kerja, tetapi juga dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun terakhir dilihat dari perkembangan PDRB sektor pertanian Kabupaten Jember menurut harga berlaku dari Rp. 991.070,77 juta pada tahun 1995 menjadi Rp. 2.296.073,02 juta pada tahun 1999 (BPS, 1999). Yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.305.002,32 atau sebesar 131,7% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember secara keseluruhan yaitu sebesar RP. 2. 243.256,609 pada tahun 1995 menjadi RP. 4.562.943,203 pada



### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1. sumbangan informasi dan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk penentuan kebijaksanaan pembangunan pertanian;
2. bahan informasi lebih lanjut bagi para peneliti lain yang sejenis.





## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Yuwono (1999) dengan judul penelitian " Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 (Studi Kasus Kotamadya Dati II Salatiga)" berusaha untuk menentukan sektor pembangunan daerah Kotamadya Salatiga yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa tengah. Pemilihan daerah Kotamadya Salatiga sebagai daerah penelitian didasarkan atas perlunya daerah Kotamadya Salatiga mempersiapkan diri menghadapi implementasi UU No. 22/1999 dan secara ekonomis karena Kotamadya Salatiga mempunyai sifat kota dengan karakteristik yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier yang menyebabkan karakteristik Kotamadya Salatiga tidak berbeda dengan Propinsi Jawa Tengah pada umumnya, kecuali untuk sektor pertanian serta dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kotamadya Salatiga (7,335) yang lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata PDRB pertahun Jawa Tengah (6,31 %).

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa PDRB Kotamadya Salatiga dan Propinsi Jawa Tengah , dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus, serta analisis yang digunakan adalah LQ (*Location Quotient*), karena LQ hanya bersifat statis dan hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu, maka untuk melihat atau menggambarkan laju pertumbuhan subsektor prioritas pada masa yang akan datang digunakan analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*), dan untuk mengetahui sebab terjadinya reposisi sektoral digunakan analisis *Shiftshare* tahun 1996. Hasil dari analisis LQ dan DLQ studi kasus kota Salatiga dapat dilihat pada tabel 2. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis LQ statis pada tahun 1996 yang menjadi sektor unggulan adalah: a). sektor listrik dan air bersih b). Sektor bangunan c) Sektor pengangkutan dan komunikasi d). Sektor keuangan, persewaan dan jasa usaha serta e). Sektor jasa-jasa lain. Dilihat dari nilai DLQ , kecuali sektor keuangan, persewaan, dan jasa usaha, sektor unggulan

di Kotamadya Salatiga dapat diharapkan unggul dikemudian hari. Sedangkan sektor yang tidak diunggulkan saat ini, nampaknya ada dua sektor yang sebenarnya dapat diharapkan unggul dikemudian hari yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2. LQ dan SS Kotamadya Salatiga Terhadap Propinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-1996.

Lapangan Usaha	Location		Shift Share (SS), (milyar RP.)		
	Quatients (LQ)		Struktural	Lokasio nal	Total
	Statis	Dinamis			
Pertanian	0,253	1,187	-0,23	0,34	0,11
Pertambangandanpenggalian	0,492	1,141	-0,03	0,04	0,01
Listrik dan air Bersih	5,761	1,234	-0,67	0,73	0,05
Industri Pengolahan	0,580	0,189	3,09	-2,67	0,42
Bangunan	1,523	1,338	-0,95	1,06	0,11
Perdagangan, hotel, dan restoran	0,947	0,962	1,96	1,54	0,42
Pengangkutan dan komunikasi	2,582	1,043	-0,18	0,36	0,18
Kuangan, Persewaan dan jasa usaha	1,816	0,990	-0,26	0,43	0,17
Jasa-jasa lain	2,434	1,059	-2,25	2,73	0,47
PDRB	1,000	1,000	0,47	1,47	1,94

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, Tahun 1998, diolah, November 2000.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Salah satu tujuan dari kebijakan pembangunan adalah mengurangi perbedaan tingkat perkembangan dan pembangunan serta kemakmuran antar daerah yang satu dengan yang lain. Dilain pihak adanya *paradox* antara tujuan pembangunan dengan tujuan kenaikan pendapatan nasional yang cepat. Jika tekanan diberikan pada percepatan kenaikan pendapatan, maka investasi akan terkonsentrasi pada daerah-daerah yang sudah maju, memiliki sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial. Akibatnya daerah yang relatif sudah maju makin maju sedangkan daerah-daerah yang terbelakang akan makin sukar untuk berkembang.

Dampak ini dirasakan kurang adil dan dapat menimbulkan kesenjangan yang akhirnya akan mengganggu kestabilan politik maupun sosial. Karena itu



hampir semua negara sedang mengadakan usaha pembangunan yang terdiri dari daerah-daerah yang relatif sudah maju dan daerah-daerah yang masih terbelakang, baik secara absolut maupun relatif, maka tujuan mengurangi perbedaan dalam tingkat kemajuan ini perlu mendapat prioritas. Usaha ini dapat mengurangi kecepatan kenaikan pendapatan nasional yang berdampak pada pendapatan daerah dalam jangka pendek (Kadariah,1982:69).

Adanya usaha-usaha yang dapat mengurangi pendapatan suatu daerah berimplikasi pada adanya suatu kebijaksanaan ekonomi regional. Kebijakan ekonomi regional adalah penggunaan secara sadar berbagai macam peralatan (insruments atau means) untuk merealisasikan tujuan-tujuan regional yang salah satunya adalah peningkatan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) suatu daerah.

Permasalahan pembangunan dan analisis regional pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa perkembangan daerah tidak terjadi secara bersama-sama, dengan intensitas yang berbeda. Kondisi daerah yang satu berbeda dengan daerah lain. Faktor dasar dalam perbedaan ini adalah struktur perekonomian daerah yang bersangkutan (Glasson,1997 :67).

Penentuan perencanaan regional memiliki banyak alat analisis yang digunakan untuk menentukan kegiatan atau memilih aktivitas ekonomi yang akan dikembangkan disuatu daerah atau untuk memilih lokasi atau daerah bagi suatu aktivitas ekonomi atau suatu proyek. Diantara tehnik-tehnik analisa tersebut yang tergolong sederhana adalah penggunaan *Location Quotient* (LQ). Dalam hubungan ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua yaitu : 1) kegiatan ekonomi yang melayani pasar didaerah itu sendiri dan pasar diluar daerah. 2) kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar didaerah itu sendiri. Kegiatan ekonomi yang termasuk golongan pertama disebut kegiatan ekonomi basis (*base activity*) sedang yang kedua disebut kegiatan ekonomi non basis (*non base activity*) atau kegiatan lokal

Dasar pemikiran penggunaan tehnik ini adalah karena industri basis ini menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar didaerah maupun untuk pasar diluar



daerah yang bersangkutan, sehingga penjualan keluar daerah itu akan mendatangkan arus pendapatan kedalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

Kenaikan pendapatan di daerah itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri *basic* melainkan juga peningkatan permintaan hasil industri lokal *non basic*, yang akhirnya akan meningkatkan investasi di industri-industri tersebut. Dengan kata lain, penanaman modal di industri-industri lokal merupakan investasi yang *induced* sebagai akibat kenaikan pendapatan di industri-industri *basic*.

Berdasarkan gagasan ini, maka orang berpendapat bahwa industri-industri *basic* (dasar) inilah yang patut dikembangkan di daerah. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menggolongkan tiap industri di suatu daerah kedalam satu dari dua golongan tersebut. Untuk inilah LQ dipakai. Analisis LQ ini mengukur konsentrasi suatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan/industri yang sama dalam perekonomian nasional.

Analisis *Location Quotients* merupakan salah satu metode tak langsung untuk mengukur konsentrasi kegiatan ekonomi disektor industri secara relatif berdasarkan nilai tambah bruto atau tenaga kerja. LQ merupakan indeks yang membandingkan sumbangan dalam persen beberapa agregasi dasar.

Rumus analisis *Location Quotients* (LQ) sebagai berikut (Aziz, 1994:154) :

$$LQR_i = \frac{VR_i / VR}{Vi / V}$$

dimana :

LQR<sub>i</sub> = Indeks LQ dari sektor/subsektor i pada daerah j (Rp)

VR<sub>i</sub> = *Value added* sektor/subsektor i pada daerah j (Rp)

VR = Jumlah semua *value added* sektor/subsektor i di daerah j (Rp)

V<sub>i</sub> = *Value added* sektor/subsektor i diseluruh daerah (Rp)

V = Jumlah semua *value added* sektor/subsektor seluruh daerah (Rp)

Analisis LQ Merupakan indikator yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan sektor atau subsektor dalam suatu kegiatan ekonomi di daerah. Jika suatu sektor atau subsektor memiliki  $LQ > 1$  maka sektor atau subsektor tersebut merupakan sektor atau subsektor yang kuat sehingga secara potensial merupakan pengekspor produk dari sektor atau subsektor tersebut ke daerah yang lain atau dengan kata lain dapat dijadikan sebagai leading sector (sektor pemimpin) karena sektor atau subsektor tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya jika suatu sektor atau subsektor memiliki nilai  $LQ < 1$  maka sektor atau subsektor tersebut menjadi pengimpor produk dari sektor atau subsektor tersebut.

Penggunaan analisis LQ untuk menentukan apakah sektor atau subsektor tersebut basis atau non basis mensyaratkan bahwa asumsi dari LQ harus dimengerti. Asumsi tersebut adalah : selera dan pendapatan konsumen sama, Fungsi produksi dari setiap sektor hampir sama atau identik di setiap daerah, Permintaan dari dalam daerah harus dipenuhi oleh produksi daerah tersebut lebih dahulu. Tetapi penggunaan LQ dalam analisa ini mengandung kelemahan-kelemahan, diantaranya yaitu :

#### *1. Asumsi-asumsi yang mendasarinya*

Asumsi –asumsi yang mendasari LQ pada kenyataannya tidak sepenuhnya terwujud karena : selera dan pola pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat berlainan di setiap daerah, tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang tidak sama di setiap daerah, kebutuhan-kebutuhan untuk produksi, dan juga produktivitas buruh berbeda diantara daerah

Walaupun demikian, penggunaan analisis LQ ini tak dapat diabaikan begitu saja, karena Analisis LQ ini juga mempunyai keunggulan-keunggulan yaitu antara lain : sederhana, mudah diterapkan, dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dampak umum dari perubahan-perubahan jangka pendek, dapat berfungsi sebagai titik tolak yang penting bagi model-model yang lebih kompleks.

Singkatnya, LQ jika digunakan tersendiri, tidak banyak gunanya. Tetapi jika



teknik ini dipakai dipakai bersama dengan alat analisa lain, yang memperhitungkan dan mencakup fungsi-fungsi produksi dan konsumsi yang non linear dan juga yang memperhitungkan perbedaan-perbedaan regional dalam selera, tingkat pendapatan dan distribusinya, praktek-praktek produksi dan *industrial mixes*, maka analisis *Location Quotient* ini banyak gunanya.

## 2. kriteria-kriteria yang dipakai

Kriteria-kriteria LQ bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Sehingga sebagai alternatifnya digunakan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksi laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (o) dan tahun (t). DLQ dapat dirumuskan sebagai berikut (Yuwono, 1999 :50).

$$DLQ = \left[ \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

Dimana:

- $g_{in}$  = Laju pertumbuhan sub-sektor (i) di daerah.(n).
- $g_n$  = Rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian di daerah (n).
- $G_i$  = Laju pertumbuhan sub sektor (i) di daerah himpunan
- $G$  = Rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian di daerah himpunan

Tafsiran atas DLQ pada dasarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. jika  $DLQ = 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (n) sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan daerah himpunan. Jika  $DLQ < 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (n) lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya.



Kondisi demikian menyatakan bahwa selama keadaan masih tetap sebagaimana adanya, maka pada masa depan sektor ini akan kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain dalam daerah himpunannya. Sebaliknya jika  $DLQ > 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap PDRB daerah (n) lebih cepat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah himpunannya. Pada masa depan, kalau keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa sektor ini akan unggul dalam persaingan.

### 2.2.2 Kontribusi Sektor Pertanian

Pemerintah kini sedang menerapkan konsep "Pertanian Tangguh" yang juga sebagai sasaran dari kebijaksanaan pembanguana pertanian Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk mempertinggi produksi dan pendapatan petani sebagai langkah yang terarah agar tercapai kemakmuran dipedesaan. Pembangunan pertanian dilaksanakan melalui suatu usaha dengan strategi yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui peningkatan pendapatan petani.

Menurut Soekartawi (1996:2), pertanian sebagai sektor yang tangguh dalam pembangunan diimplementasikan dalam peran dan kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan nasional sebagai :

- a. penghasil bahan pangan bagi masyarakat dan penyedia lapangan kerja;
- b. pendorong munculnya lapangan usaha (*Agroindustri*);
- c. penyedia faktor produksi dan bahkan industri bahan baku seperti industri peralatan pertanian dan pupuk; serta
- d. penghasil devisa yang cukup besar.

Kontribusi sektor pertanian merupakan sumbangan yang diberikan oleh sektor pertanian terhadap PDB nasional. Indikator kontribusi sektor dalam suatu perekonomian dipergunakan untuk menganalisis sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar (dominan) terhadap PDB, mengetahui struktur perekonomian daerah setempat pada tahun tertentu, dan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi pada kurun waktu tertentu. Kontribusi ekonomi sektor dapat dirumuskan sbb. (Kantor Statistik Kabupaten Jember, 1999b: 9):

$$P_{it} = \frac{X_{it}}{X_t} 100\%$$

Dimana :

$P_{it}$  = kontribusi sektor (i) pada tahun (t)

$X_{it}$  = besarnya PDRB sektor (i) pada tahun (t)

$X_t$  = besarnya PDRB total pada tahun (t)

Jika  $P_{it} < 19,99\%$ , berarti sektor tersebut memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDB, dan jika  $19,99\% < P_{it} < 40,00\%$ , berarti sektor tersebut memiliki kontribusi sedang terhadap PDB, sedangkan jika  $P_{it} > 40\%$ , maka sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDB.

Kontribusi yang diberikan sektor pertanian pada perekonomian nasional maupun regional menjadikan pertanian sebagai sektor pemiripin dalam kegiatan pembangunan nasional dan regional. Selama sembilan bulan pertama tahun 2000 ekonomi Indonesia (PDB secara riil) mengalami pertumbuhan 4,5 % bila dibandingkan dengan sembilan bulan pertama tahun 1999. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB relatif besar (17%-18%), sektor ini menyerap juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pada tahun 1998 sektor pertanian menyerap sekitar 44,96% dari seluruh pekerja yang pada tahun 2000 jumlahnya menjadi 87,67 juta orang (Grafika Press, 2001:8). Pada awal krisis ekonomi melanda Indonesia, sektor pertanian (pedesaan) merupakan tempat penampungan angkatan kerja yang terlempar dari sektor perkotaan.

Kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian berperan positif dalam memacu pembangunan nasional, seperti melalui penyediaan pangan dan bahan baku bagi sektor hilir. Penyediaan kedua kelompok produk ini dengan laju pertumbuhan yang berlanjut dan stabil merupakan kontribusi produk sektor pertanian dalam menunjang pertumbuhan industri dan perekonomian nasional. Kontribusi yang lain yaitu berupa kontribusi faktor produksi dan kontribusi devisa



yang diwujudkan dalam bentuk pembentukan modal dan penyediaan tenaga kerja serta penerimaan devisa dari ekspor pertanian.

Menurut Soekartawi (1996:2), paradigma pembangunan pertanian pada masa yang akan datang sebagai berikut :

- 1) dari pendekatan sentralisasi kependekatan desentralisasi;
- 2) dari pendekatan komoditas kependekatan sumberdaya;
- 3) dari pendekatan pendapatan petani kepeningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
- 4) dari skala usaha pertanian subsistem ke komersial;
- 5) dari padat karya kemesin;
- 6) dari komoditi primer ke komoditi yang mempunyai nilai tambah tinggi; dan
- 7) dari dominasi pemerintah kepartisipasi swasta yang lebih besar.

Tujuan pembangunan pertanian adalah pertanian yang maju (*modern*), yang terspesialisasi dengan teknologi yang hemat, tenaga kerja, dan memperhatikan skala ekonomi yang efisien (*economic of scale*) yaitu dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

### 2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai tambah yang dihitung dari seluruh sektor ekonomi yang terdapat di suatu daerah apabila dijumlahkan akan membentuk PDRB. Dalam kaitannya dengan PDRB ada beberapa hal yang perlu diketahui.

#### A. Pengertian PDRB

Produk domestik regional bruto dapat diinterpretasikan menurut tiga pengertian (Kantor Statistik Kabupaten Jember, 1999a:4) :

- 1) menurut pengertian produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu region dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Unit-unit tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu :



- a. pertanian, terdiri dari 5 subsektor yaitu: tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
  - b. pertambangan dan penggalian;
  - c. industri pengolahan;
  - d. listrik, gas dan air bersih;
  - e. bangunan;
  - f. perdagangan, hotel, dan restoran;
  - g. pengangkutan dan komunikasi;
  - h. keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan;
  - i. jasa-jasa
- 2) menurut pengertian pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu region dalam jangka waktu tertentu (1 Tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan diatas, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor (lapangan usaha);
- 3) menurut pengertian pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto disuatu region dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor. Ekspor dalam hal ini tidak terbatas hanya keluar negeri, tetapi termasuk juga yang hanya keluar daerah/wilayah baik lewat laut, udara, maupun lewat darat. Demikian juga kebalikannya (impor).

## B. Manfaat dan Kegunaan PDRB

Perhitungan PDRB mempunyai manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak, dapat dikelompokkan menjadi empat (Partadireja, 1986:12) yaitu :

- a. untuk mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu daerah;
- b. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu;
- c. membandingkan perekonomian antar daerah;
- d. merumuskan kebijaksanaan pemerintah.

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang di ajukan sebagai berikut:

- a. prioritas pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Jember pada tahun 1999 pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
- b. prioritas pembangunan sektor pertanian dimasa datang (2000-2004) adalah subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
- c. sektor pertanian rata-rata memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Kabupaten Jember tahun 1995-1999 dan subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan masing-masing memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Jember tahun 1995-1999.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif Travers (dalam Sevilla 1993:71) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala-gejala tertentu.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember secara sektoral yaitu sektor pertanian yang meliputi subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jember memiliki sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nasional dan daerah khususnya. Penelitian ini bertujuan memilih subsektor basis dan subsektor dominan dengan menggunakan unit analisis *location quotient* ( LQ statis ), *dynamic location quotient* ( LQ dinamis), dan kontribusi sektoral.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari Biro Pusat Statistik daerah Kabupaten Jember dan dari Kantor BPS Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala (*Time Series*) tahun 1995-1999.

#### 3.3 Metode Analisis Data

1. Untuk mengetahui prioritas pembangunan ekonomi sektor pertanian dikabupaten daerah Kabupaten Jember digunakan analisis LQ (*Location Quotients*) masing masing subsektor pertanian ( Aziz, 1994:154 ).

$$LQRi = \frac{VRi / VR}{Vi / V}$$

LQRi = Indeks LQ dari subsektor i di Kabupaten Jember (Rp)

VRi = *Value added* subsektor i di Kabupaten Jember (Rp)



- VR = Jumlah semua *value added* semua sektor (PDRB) Kabupaten Jember (Rp)
- Vi = *Value added* subsektor i di Propinsi Jawa Timur (Rp)
- V = Jumlah semua *value added* semua sektor (PDRB) Propinsi Jawa Timur (Rp)

Kriteria yang dipakai :

$LQ > 1$ , menyatakan bahwa subsektor i memiliki keunggulan komparatif dan dapat dijadikan leading subsector dalam wilayah pembangunan

$LQ < 1$ , menyatakan bahwa subsektor i tidak memiliki keunggulan komparatif dan tidak dapat dijadikan leading subsector dalam wilayah pembangunan

$LQ = 1$ , menyatakan bahwa subsektor i tersebut mencukupi kebutuhan (swasembada) dalam wilayah pembangunan.

2. Untuk mengetahui subsektor pertanian yang dapat dijadikan prioritas pembangunan dikemudian hari digunakan rumus sebagai berikut (Yuwono, 1999 : 50)

$$DLQ_{in} = \left[ \frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

Dimana:

$DLQ_{in}$  = DLQ subsektor (i) di daerah Kabupaten Jember

$g_{in}$  = Laju pertumbuhan sub-sektor (i) di daerah Kabupaten Jember.

$g_n$  = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten Jember.

$G_i$  = Laju pertumbuhan sub sektor (i) di daerah Propinsi Jawa Timur

$G$  = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB daerah Propinsi Jawa Timur.

Kriteria yang dipakai :

$DLQ = 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan subsektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sebanding dengan laju pertumbuhan subsektor tersebut dengan laju pertumbuhan daerah Propinsi Jawa Timur.

$DLQ < 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten Jember lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah Propinsi Jawa timur.

$DLQ > 1$ , berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap PDRB daerah Kabupaten Jember lebih cepat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah Propinsi Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi sektor pertanian dan tiap-tiap subsektor dibawahnya terhadap PDRB total dan PDRB sektor pertanian Kabupaten Jember pada kurun waktu tahun 1995-1999 digunakan rumus sebagai berikut : (Kantor Statistik Kabupaten Jember, 1999b: 9 )

$$P_{it} = \frac{X_{it}}{X_t} 100\%$$

Dimana :

$P_{it}$  = Kontribusi subsektor (i) pada tahun (t).

$X_{it}$  = Besarnya PDRB subsektor(i) pada tahun (t).

$X_t$  = Besarnya PDRB sektor pertanian pada tahun (t).

Kriteria yang dipakai :

$P_{it} < 19,99\%$ , berarti subsektor tersebut memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Jember

$19,99\% < P_{it} < 40,00\%$ , berarti subsektor tersebut memiliki kontribusi sedang terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Jember

$P_{it} > 40\%$ , maka subsektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB sektor pertanian Kabupaten Jember

### 3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Untuk memperjelas pengertian masalah yang dibahas dalam penulisan ini maka digunakan batasan-batasan sebagai berikut:



1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihitung dari sektor ekonomi yang terdapat disuatu daerah;
2. *value added subsektor* adalah nilai tambah subsektor dari sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang besarnya ditunjukkan oleh nilai PDRB masing-masing subsektor;
3. subsektor prioritas adalah subsektor yang memenangkan persaingan dengan subsektor lain;
4. subsektor dalam sektor pertanian terdiri dari subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
5. kontribusi subsektor pertanian adalah sumbangan (*share*) yang diberikan oleh subsektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian;
6. laju pertumbuhan ekonomi adalah jumlah laju pertumbuhan nilai PDRB dari tahun ketahun dalam periode waktu tertentu.
7. keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu subsektor dibandingkan dengan subsektor lainnya dalam memberikan sumbangan bagi pertumbuhan pendapatan daerah.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

###### 4.1.1 Peran Kabupaten Jember dalam Konteks Propinsi Jawa Timur

Sumbangan pekonomian Kabupaten Jember terhadap perekonomian Propinsi Jawa Timur relatif kecil, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan sektor. Pada tahun 1999 kontribusi perekonomian Kabupaten Jember terhadap perekonomian Kabupaten Jawa Timur hanya sebesar 3,93%. Namun demikian, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Jember melebihi laju pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. Secara rata-rata selama kurun waktu lima tahun (1995-1999), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember menurut harga berlaku rata-rata sebesar 26,34% pertahun. Sedangkan pertumbuhan Propinsi Jawa Timur rata-rata sebesar 20,68%.

Bila dilihat dari sumbangan sektor pertanian maka subsektor peternakan dan perkebunan Kabupaten Jember memberikan sumbangan paling besar pada sektor yang sama pada perekonomian Propinsi Jawa Timur, dibandingkan subsektor-subsektor yang lain. Pada tahun 1999, subsektor peternakan menyumbang 22,15% terhadap subsektor peternakan Propinsi Jawa Timur dan subsektor perkebunan menyumbang 11,84% terhadap subsektor perkebunan Propinsi Jawa Timur.

Perbandingan sektoral antara kabupaten Jember dengan Propinsi Jawa Timur dapat diperluas dengan kontribusi sektor dalam masing-masing perekonomian. Tabel 3 (tiga) memberikan gambaran tentang perbandingan perekonomian (sektor pertanian) Kabupaten Jember dengan perekonomian (sektor pertanian) propinsi Jawa Timur. Pada tahun 1999, sektor pertanian menjadi sektor yang memberi kontribusi terbesar di Kabupaten Jember, sektor pertanian menyumbang sebesar 41,26%, yang berarti sektor pertanian memberikan kontribusi yang tinggi dan menjadi pilar utama perekonomian Kabupaten Jember. Sedangkan pada Propinsi Jawa Timur Sektor Pertanian hanya menyumbang 17,87%, yang berarti sektor pertanian memberikan kontribusi yang rendah terhadap perekonomian Propinsi Jawa timur. Dengan demikian pada dasarnya



struktur perekonomian Kabupaten Jember berbeda dengan struktur perekonomian Jawa Timur.

Tabel 3. Perbandingan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1999 (dalam Juta Rupiah).

Sektor/ Subsektor	Kabupaten Jember			Propinsi Jawa Timur		
	Nilai	Kontribusi terhadap PDRB Kab. Jember(%)	Kontribusi Terhadap PDRB Prof. Jawa Timur(%)	Nilai	Kontribusi Terhadap PDRB Jawa Timur(%)	Kontribusi SektoralKab Jember terhadap Propinsi Jawa Timur(%)
Tanaman Pangan	478.133,76	19,43	0,87	6.693.479,92	12,16	7,14
Tanaman Perkebunan	168.388,76	12,69	0,31	1.491.946,28	2,71	11,29
Peternakan	199.694,83	10,02	0,36	901.457,88	1,63	22,15
Kehutanan	5.925,82	0,25	0,01	232.029,85	0,42	2,55
Perikanan	29.587,65	1,30	0,05	685.190,11	1,24	4,31
Sektor Pertanian	881.730,32	41,26	1,60	10.004.104,03	18,17	9,81
PDRB Total	2.136.985,25	100,00	3,93	55.038.126,58	100,00	3,93

Sumber : Kantor Statistik Jawa Timur ,1999, diolah,Februari 2001.

#### 4.1.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Jember

Penentuan struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara membagi kegiatan ekonomi menjadi tiga sektor. Pertama adalah sektor primer (*agriculture*), yaitu kegiatan ekonomi yang membudidayakan sumber daya alam secara langsung, tanpa ada proses pengolahan, ini meliputi kegiatan pertanian dan pertambangan. Kedua adalah sektor sekunder (*manufacture*), yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi atau setengah jadi, termasuk dalam katagori ini adalah industri, listrik, air minum, dan bangunan. Ketiga adalah sektor tersier (*Service*), yaitu kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang tetapi jasa, meliputi kegiatan perdagangan, keuangan, pengangkutan, pemerintahan, sewa rumah dan jasa-jasa lainnya. (Bappeda Kalimantan Barat, 1992 : 91)

Perubahan dan perkembangan struktur perekonomian wilayah dapat dilihat dari komposisi ketiga sektor tersebut dalam perekonomian wilayah. Semakin besar proporsi sektor sekunder dan tersier, dapat dikatakan perekonomian menuju

kearah kemajuan dan sebaliknya. Untuk kondisi wilayah-wilayah yang dalam tahap berkembang, komposisi ketiga sektor membentuk piramida, dimana sektor primer menjadi dasar, sedang sektor tersier menjadi puncaknya.

Tabel 4. Struktur Perekonomian Wilayah Kabupaten Jember Tahun 1995 –1999

	1995	1996	1997	1998	1999
Sektor Primer	45,46	45,30	44,15	40,90	41,75
Sektor Sekunder	12,62	12,22	12,17	11,16	11,21
Sektor Tersier	41,92	42,48	43,68	47,94	46,96
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a ,diolah,Februari 2001.

Struktur perekonomian Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 1995-1999 yang ditunjukkan oleh tabel 4, menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Jember memiliki karakteristik yang unik, dimana proporsi sektor primer dominan pada tiga tahun pertama yaitu 1995-1997 (45.46%, 45,30%, dan 44,15%) dan sektor tersier paling dominan pada dua tahun terakhir (47,94 % dan 46,96%). Di lain pihak sektor sekunder berfluktuasi dan menunjukkan kecenderungan yang menurun pada empat tahun pertama yaitu dari 12,62% menjadi 12,22% , 2,17% dan 11,16, tetapi pada tahun kelima mulai ada peningkatan sebesar 0,5%, Walaupun secara agregatif peranannya semakin kecil.

Besarnya sektor primer, dengan pertanian yang sangat dominan, dapat dipandang dari dua hal. Pertama, dapat berarti bahwa nilai tambah yang dihasilkan pada sektor ini melebihi sektor lain, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan sektor lain. Kedua, majunya sektor primer di Kabupaten Jember ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi produksi (komoditas primer) lebih kuat ketimbang kegiatan pertukaran, artinya wilayah Kabupaten Jember cenderung sebagai lahan produksi, artinya produksi yang dihasilkan mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Besarnya sektor tersier, utamanya dua tahun terakhir, mengindikasikan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi walaupun kecil yaitu dari kegiatan ekonomi produksi (komoditas primer) ke kegiatan ekonomi jasa (*service*).



### 4.1.3 Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Jember

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga diharapkan tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi dan terjadi keseimbangan antara lalu lintas modal dari dan keluar suatu daerah. Sehingga pada akhirnya akan tercipta kestabilan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 1999 ditunjukkan oleh keadaan perekonomian Kabupaten Jember secara keseluruhan yang tercermin dalam PDRB yaitu Jumlah atau seluruh nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatannya disuatu daerah (*region*) tertentu tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. Konsep yang lazim dipakai untuk menghitung pendapatan masyarakat guna mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah sampai saat ini masih dalam bentuk PDRB.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 1995-1999 berdasarkan atas dasar harga konstan yang ditunjukkan oleh tabel 5 secara rata-rata pertahun adalah positif yaitu sebesar 4,23%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 1999 ditunjukkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993, sebesar 1,89%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 ini memang relatif kecil, tetapi merupakan tahap pemulihan perekonomian akibat krisis ekonomi dan sebagai tanda bahwa perekonomian mulai bangkit.

Tabel 5. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999.

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b> (Jutaan Rupiah)	<b>Kenaikan</b> (Jutaan Rupiah)	<b>Pertumbuhan</b> (%)
1995	1.838.604,18	-	-
1996	2.170.699,24	332.090,10	18,06
1997	2.269.330,32	98.636,08	4,54
1998	2.097.376,00	-171.954,30	-7,56
1999	2.136.985,25	39.609,25	1,89
<b>Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun</b>			<b>4,23</b>

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a, diolah, Februari 2001.

Keberhasilan Kabupaten Jember bangkit dari krisis ekonomi tersebut diatas disebabkan karena sektor pertanian sebagai sektor yang paling dominan di Kabupaten Jember dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 41,26% mengalami pertumbuhan sebesar 4,52% (lihat tabel 5). Pertumbuhan ini disebabkan karena meningkatnya produktifitas komoditi-komoditi yang ada didalamnya sebagai konsekuensi dari meningkatnya daya saing komoditi pertanian tersebut. Subsektor pertanian yang memberikan sumbangan pertumbuhan tertinggi adalah subsektor kehutanan yaitu sebesar 8,95%, dengan nilai kontribusi terhadap total PDRB sebesar 0,39%. Subsektor tanaman pangan dikatakan sebagai “pilar utama” sektor pertanian, karena mampu memberikan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 29,01% mengalami pertumbuhan 7,80%.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999.

Sektor/Subsektor	Pertumbuhan (dalam persen)				
	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	9,63	8,42	2,18	-19,06	4,52
1.1 Tanaman Pangan	9,25	9,06	0,43	0,59	7,80
1.2 Tanaman Perkebunan	8,15	8,70	1,19	-39,68	-3,08
1.3 Peternakan	11,47	6,24	5,10	-13,92	1,98
1.4 Kehutanan	14,85	5,57	-22,05	-4,23	8,95
1.5 Perikanan	16,36	14,11	13,83	-1,08	1,66
2. Pertambangan & peng galian	0,60	0,90	-0,02	0,03	0,00
3. Industri Pengolahan	2,91	4,85	-0,05	0,06	-0,04
4. Listrik, gas, dan Air Bersih	5,01	14,49	0,10	0,13	0,27
5. Bangunan	5,00	3,58	-0,10	-1,20	0,01
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9,81	11,72	0,81	1,59	0,03
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,46	7,85	0,15	0,70	0,00
8. Keuangan, Perswaan, dan jasa Perusahaan	11,60	13,90	-0,02	0,35	-0,95
9. Jasa-Jasa	6,95	6,57	0,05	1,62	0,04
<b>PDRB Total</b>	<b>8,60</b>	<b>8,71</b>	<b>4,54</b>	<b>-7,57</b>	<b>1,89</b>

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999b, diolah, Februari 2001.

Subsektor perikanan dan subsektor peternakan masing-masing tumbuh sebesar 1,66% dan 1,98%, dengan kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar 1,38% dan 9,34%. Subsektor perkebunan mengalami pertumbuhan minus



3,08% dengan sumbangan terhadap total PDRB sebesar 7,88%.

Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah sektor, listrik, gas, dan air bersih yaitu sebesar 14,40% dengan kontribusi terhadap PDRB hanya sebesar 1,54%. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh sektor-sektor lain seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran tumbuh sebesar 2,05% dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 18,74%, sektor bangunan tumbuh sebesar 2,02% dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,40%, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,40% dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 7,62%, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 1,77% dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 6,84%, kemudian sektor jasa-jasa dan sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh masing-masing sebesar 1,40% dan 0,95% dengan kontribusi masing-masing sebesar 9,07% dan 0,49%. Sektor yang mengalami pertumbuhan minus adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan minus sebesar 11,47% dengan kontribusi pada total PDRB sebesar 6,28%.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Penentuan Subsektor Pertanian Prioritas Pada Tahun 1999 dan di Masa Datang (2000-2004) di Kabupaten Jember.

Penentuan prioritas pembangunan bagi subsektor-subsektor yang berada dibawah sektor pertanian menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 1993 di Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan adalah metode *Locatient Quatients* (LQ) yaitu yang membandingkan antara besarnya PDRB Kabupaten Jember dengan PDRB Propinsi Jawa Timur. Subsektor pertanian disebut sebagai subsektor basis apabila memiliki nilai LQ lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ), artinya subsektor tersebut memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Jember dibandingkan dengan subsektor sejenis di Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya subsektor tersebut menjadi prioritas pembangunan dan menjadi subsektor pemimpin (*leading subsector*) bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 1999. Dikarenakan LQ hanya menggambarkan keadaan perekonomian

perekonomian hanya pada suatu titik, maka metode LQ ini tidak bisa digunakan untuk menentukan subsektor mana yang dapat dijadikan subsektor prioritas di masa datang. Kelemahan tersebut dapat di atasi dengan penggunaan metode *Dynamic Locatient Quotients* (DLQ) atau disebut dengan LQ dinamis. Subsektor yang memiliki nilai DLQ lebih besar dari satu disebut sebagai subsektor basis di masa datang. Selanjutnya subsektor ini dapat dijadikan prioritas pembangunan dan *leading subsector* di masa datang.

Penentuan nilai LQ dan DLQ menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 menurut lapangan usaha di Kabupaten Jember tahun 1995-1999. Perhitungan dengan menggunakan metode LQ dan DLQ Kabupaten Jember pada tahun 1999 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. LQ dan DLQ Sektor dan Subsektor–Subsektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (tahun1993) di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1999.

Lapangan Usaha	LQ statis	LQ dinamis (DLQ)
Sektor Pertanian	2,2700	0,9904
Subsektor Tanaman Pangan	0,0301	0,9480
Subsektor Perkebunan	2,9068	0,9402
Subsektor Peternakan	5,7054	1,0137
Subsektor Kehutanan	0,6578	1,0134
Subsektor Perikanan	1,1121	1,0729

Sumber : Lampiran 3 dan 6

Hasil perhitungan menggunakan metode LQ statis menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten jember pada tahun 1999 memiliki nilai yang lebih besar dari satu yaitu sebesar 2,2700, sedangkan bila dilihat dari hasil perhitungan LQ dinamis maka Kabupaten Jember memiliki nilai yang lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,9904. Subsektor-subsektor yang ada dibawahnya yang memiliki nilai LQ statis lebih dari satu adalah subsektor peternakan (5,7054), subsektor perkebunan (2,9068), dan subsektor perikanan (1,1121). Subsektor tanaman pangan dan subsektor subsektor kehutanan masing-masing memiliki nilai LQ statis lebih kecil dari satu yaitu 0,0301 dan 0,6578. Apabila dilihat dari hasil perhitungan LQ dinamis maka subsektor yang memiliki nilai lebih dari satu adalah subsektor perikanan (1,0729), subsektor peternakan (1,0137), dan subsektor kehutanan (1,0134). Sektor pertanian secara umum, subsektor tanaman



pangan, dan subsektor perkebunan masing-masing memiliki nilai LQ dinamis lebih kecil dari satu yaitu 0,9904 dan 0,9480 serta 0,9402.

Hasil perhitungan LQ statis pada tabel 7 menunjukkan bahwa subsektor-subsektor dibawah sektor pertanian yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi khususnya sektor pertanian pada tahun 1999 di Kabupaten Jember adalah subsektor peternakan, perkebunan, dan perikanan. Secara umum, pada tahun 1999 sektor pertanian merupakan sektor prioritas bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember. Subsektor-subsektor yang menjadi prioritas pembangunan di masa datang berdasarkan perhitungan LQ dinamis adalah subsektor perikanan, peternakan, dan kehutanan. Di lain pihak, secara umum sektor pertanian bukan sektor prioritas di masa datang.

#### 4.2.2 Analisis Kontribusi Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian dan PDRB Total Kabupaten Jember Tahun 1995-1999.

Kontribusi sektor dan subsektor-subsektor pertanian dihitung dengan membandingkan besarnya masing-masing nilai PDRB masing-masing sektor dan subsektor terhadap PDRB sektor pertanian dan PDRB total Kabupaten Jember. Hasil perhitungan kontribusi sektor dan subsektor-subsektor pertanian terhadap PDRB total sajikan pada tabel 8 dan terhadap PDRB sektor Pertanian disajikan pada tabel 9. Kontribusi sektor dan subsektor  $i$  pada tahun  $t$  ( $Pit$ )  $< 19,99\%$  berarti kontribusinya rendah,  $Pit$   $19,99\%$  sampai  $40\%$  berarti kontribusinya sedang, dan  $Pit > 40\%$  berarti kontribusinya tinggi.

Tabel 8: Persentase Kontribusi Sektor dan subsektor-subsektor pertanian Terhadap PDRB Total Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember tahun 1995-1999

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999	Rata rata
I. Sektor Pertanian	40,57	44,82	43,69	40,41	41,26	42,15
1.1 Subsektor Tanaman Pangan	18,20	20,23	19,43	21,15	22,37	20,28
1.2 Subsektor Perkebunan	11,84	13,11	12,69	8,28	7,88	10,76
1.3 Subsektor Peternakan	9,21	9,97	10,02	9,34	9,34	9,58
1.4 Subsektor Kehutanan	0,30	0,33	0,25	0,26	0,28	0,28
1.5 Subsektor Perikanan	1,01	1,17	1,30	1,39	1,38	1,25

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1995a-1999a, diolah, Februari 2001.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB total di Kabupaten Jember tahun 1995-1999 berfluktuasi. Kontribusinya pada tahun 1995 adalah tinggi yaitu 40,57%, pada tahun 1996 kontribusinya sebesar 44,82% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 4,25%, pada tahun 1997 kontribusinya turun 1,13% yaitu sebesar 43,69%, pada tahun 1998 kontribusinya sebesar 40,41% yang berarti turun 3,28%, pada tahun 1999 kontribusinya meningkat kembali yaitu sebesar 41,26%. Kontribusi sektor pertanian dari tahun 1995-1999 jika dirata-ratakan adalah tinggi yaitu sebesar 42,15%.

Kontribusi subsektor- subsektor pertanian terhadap PDRB total tahun 1995-1999 bervariasi, jika dirata-ratakan maka tidak ada subsektor yang memberikan kontribusi yang tinggi. Subsektor tanaman pangan, jika dirata-ratakan hanya memberikan kontribusi sedang yaitu sebesar 20,28%, tetapi kontribusi subsektor ini memiliki kecenderungan yang meningkat yaitu 18,20% pada tahun 1995 menjadi 22,37 pada tahun 1999 dan hanya sekali mengalami penurunan yaitu pada tahun 1996 sebesar 0,80% (lihat tabel 8). Subsektor perkebunan, jika dirata-ratakan memberikan kontribusi rendah yaitu sebesar 10,76%, kontribusi subsektor ini memiliki kecenderungan yang menurun yaitu 11,84% pada tahun 1995 menjadi 7,88% pada tahun 1999 dan hanya sekali mengalami peningkatan yaitu tahun 1996 sebesar 1,27%. Subsektor peternakan, jika dirata-ratakan memberikan kontribusi rendah yaitu sebesar 9,58%, kontribusi subsektor ini memiliki kecenderungan yang meningkat yaitu 9,21% pada tahun 1995 menjadi 9,34% pada tahun 1999 dan hanya sekali mengalami penurunan yaitu tahun 1998 sebesar 0,68%. Subsektor kehutanan, jika dirata-ratakan memberikan kontribusi rendah yaitu sebesar 0,29%, kontribusi subsektor ini memiliki kecenderungan yang menurun yaitu 0,30% pada tahun 1995 menjadi 0,28% pada tahun 1999. Subsektor perikanan, jika dirata-ratakan memberikan kontribusi rendah yaitu sebesar 1,25%, kontribusi subsektor ini memiliki kecenderungan yang meningkat yaitu 1,01% pada tahun 1995 menjadi 1,38% pada tahun 1999 dan hanya sekali mengalami penurunan yaitu tahun 1999 sebesar 0,01%.



Tabel 9. Persentase Kontribusi subsektor-subsektor pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember tahun 1995-1999

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999	Rata rata
1. Subsektor Tanaman Pangan	44,87	45,13	44,47	52,33	54,23	48,21
2. Subsektor Perkebunan	29,18	29,26	29,05	20,50	19,10	25,42
3. Subsektor Peternakan	22,70	22,25	22,94	23,10	22,65	22,73
4. Subsektor Kehutanan	0,76	0,74	0,57	0,64	0,67	0,68
5. Subsektor Perikanan	2,49	2,62	2,97	3,43	3,36	2,97

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1995a-1999a, diolah, Februari 2001.

Tabel 9 menunjukkan bahwa hanya subsektor tanaman pangan saja yang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Jember tahun 1995-1999, jika dirata-ratakan maka kontribusinya adalah sebesar 48,21% dan kontribusinya memiliki kecenderungan yang meningkat yaitu sebesar 44,87% pada tahun 1995 menjadi 54,23% pada tahun 1999, serta hanya sekali mengalami penurunan yaitu pada tahun 1997 sebesar 0,66%. Dua subsektor yang lain yaitu perkebunan dan peternakan memberikan kontribusi rata-rata sedang yaitu sebesar 25,42% dan 22,73%, kontribusi keduanya memiliki kecenderungan yang menurun tetapi dengan tekanan yang berbeda. Subsektor kehutanan dan perikanan jika dirata-ratakan memberikan kontribusi yang rendah yaitu sebesar 0,68% dan 2,98% , tetapi kontribusi keduanya memiliki kecenderungan yang meningkat yaitu sebesar 0,30% dan 1,01% pada tahun 1995 menjadi 0,67% dan 3,36% pada tahun 1999.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Penentuan Subsektor pertanian Prioritas Tahun 1999 dan di Masa Datang (2000-2004) di Kabupaten Jember.

Pendekatan basis ekonomi digunakan untuk mengetahui konsentrasi kegiatan ekonomi dari suatu daerah dengan jalan mengklasifikasikan seluruh kegiatan kedalam dua golongan yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor ekonomi yang dapat melayani pasar didaerah sendiri maupun pasar diluar daerah itu disebut sebagai sektor basis, sedangkan sektor ekonomi yang hanya dapat melayani daerah itu sendiri disebut sektor non basis.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui sektor dan subsektor ekonomi yang menjadi sektor dan subsektor basis di Kabupaten Jember. Tabel 3 memberikan gambaran awal tentang kedudukan sektor Kabupaten Jember relatif terhadap Propinsi Jawa Timur. Interpretasi dari perhitungan pada tabel 7 menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Jember pada tahun 1999 merupakan sektor basis ( $LQ=2,2700$ ), sehingga sektor pertanian di Kabupaten Jember pada tahun 1999 merupakan sektor prioritas pembangunan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*).

Sudut yang lebih kecil, dalam sektor pertanian di Kabupaten Jember terdapat tiga subsektor basis yaitu subsektor perkebunan ( $LQ=2,9068$ ), subsektor peternakan ( $LQ=5,7054$ ), dan perikanan ( $LQ=1,1121$ ). Sektor pertanian secara umum, dan subsektor perkebunan, peternakan, dan perikanan secara khusus pada tahun 1999 merupakan pengekspor komoditi kedaerah lain selain memenuhi kebutuhan Kabupaten Jember sendiri yang berarti memiliki keunggulan komparatif dibandingkan sektor dan subsektor sejenis di Propinsi Jawa Timur, sehingga sektor dan subsektor-subsektor ini merupakan penghasil arus pendapatan masuk ke Kabupaten Jember pada tahun 1999 yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain. Dua subsektor lain yang non basis yaitu subsektor tanaman pangan ( $LQ=0,0301$ ) dan subsektor kehutanan ( $LQ=0,6578$ ). Hal ini disebabkan karena adanya konversi lahan dari kedua subsektor tersebut walaupun terjadi peningkatan produktifitas.

Perspektif masa datang menggunakan pendekatan DLQ pada tabel 7 dapat diinterpretasikan bahwa di Kabupaten Jember sektor pertanian di masa datang (2000-2004) bukan sektor basis ( $DLQ=0,9904$ ) yang berarti sektor pertanian kalah bersaing yaitu laju pertumbuhannya lebih rendah dari sektor sejenis di Propinsi Jawa Timur. Implikasinya, sektor pertanian di masa datang bukan prioritas pembangunan dan tidak dapat dijadikan sektor pemimpin (*leading sector*) karena tidak mampu menghasilkan arus pendapatan masuk ke Kabupaten Jember sehingga tidak mampu memberikan dorongan terhadap perkembangan sektor-sektor lain.



Sudut pandang subsektoral menunjukkan bahwa ada tiga subsektor pertanian yang merupakan subsektor basis di masa datang yaitu subsektor peternakan (DLQ=1,0137), subsektor kehutanan (DLQ=1,0134), dan subsektor perikanan (DLQ=1,0729). Implikasinya, ketiga subsektor ini merupakan subsektor prioritas dan dapat dijadikan subsektor pemimpin (*leading subsector*) bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember di masa datang (2000-2004) karena memiliki keunggulan komparatif dan memenangkan persaingan yaitu memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding subsektor-subsektor sejenis di Propinsi Jawa Timur. Dua subsektor lain yaitu subsektor tanaman pangan (DLQ=0,9480) dan subsektor perkebunan (DLQ=0,9402) merupakan subsektor non basis, sehingga bukan subsektor prioritas dan tidak dapat dijadikan *leading subsector* pembangunan di masa datang (2000-2004). Hal ini disebabkan karena pertumbuhannya yang rendah akibat adanya konversi lahan pertanian untuk sektor-sektor lain dan peningkatan produktifitasnya lebih rendah dibanding sektor-sektor lain.

Hasil yang diperoleh bila dibandingkan dengan penelitian Yuwono, kasus Kotamadya Salatiga, memiliki perbedaan yang mencolok. Salatiga, pada tahun 1996 sektor pertanian bukan sektor basis (LQ=0,253), tetapi untuk masa-masa datang merupakan sektor basis (DLQ=1,187). Menurut Yuwono (1998:56), hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktifitas pada sektor pertanian.

#### **4.3.2 Penentuan Kontribusi Sektor dan Subsektor Pertanian yang Dominan Terhadap Perekonomian Kabupaten Jember Tahun 1995-1999.**

Penentuan Kontribusi sektor dan subsektor pertanian yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Jember tahun 1995-1999 adalah dengan membandingkan besarnya kontribusi masing-masing sektor dan subsektor terhadap PDRB total dan PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan tahun 1993 di Kabupaten Jember.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB total tahun 1995-1999 rata-rata adalah tinggi (42,150), yang berarti kontribusinya dominan pada perekonomian Kabupaten Jember. Dominasi sektor pertanian dalam

perekonomian Kabupaten Jember juga tampak pada kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 46,93% pada tahun 1999, selain itu sektor pertanian juga mendorong berkembangnya perusahaan agroindustri di Kabupaten Jember dan peranan Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Kontribusi sektor pertanian yang dominan ini menjadikan sektor pertanian sebagai sektor pemimpin dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember. Perkembangan kontribusi sektor pertanian berfluktuasi, misalnya pada tahun 1996,1997,1998 mengalami kecenderungan yang menurun, hal ini diakibatkan menurunnya produktifitas dari sektor ini baik akibat gangguan alam seperti el-nino dan el-nina maupun karena krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia. Pada tahun 1999 sektor pertanian mulai bangkit dikarenakan adanya peningkatan produktifitas akibat dari peningkatan daya saing komoditi pertanian.

Kontribusi subsektor-subsektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Jember masing-masing berbeda. Subsektor tanaman pangan secara rata-rata memberikan kontribusi sedang (20,28%), sedangkan subsektor-subsektor yang lain kontribusinya rendah yaitu subsektor perkebunan (10,76%), subsektor peternakan (9,58%), subsektor kehutanan (0,284%), dan subsektor perikanan (1,25%). Kesimpulan yang diperoleh bahwa kontribusi masing-masing subsektor terhadap perekonomian Jember tidak dominan, sehingga masing-masing subsektor tersebut bukan merupakan subsektor pemimpin bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Jember.

Kontribusi subsektor-subsektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian berbeda-beda, subsektor tanaman pangan secara rata-rata memberikan kontribusi yang tinggi (48,21%), subsektor perkebunan dan peternakan memberikan kontribusi sedang yaitu 25,42% dan 22,73%, dan subsektor kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rendah yaitu 0,68% dan 2,97%. Impikasinya, bahwa subsektor yang dominan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Jember adalah subsektor tanaman pangan, sehingga disebut sebagai "*pilar utama*" sektor pertanian, artinya subsektor tanaman pangan merupakan subsektor pemimpin dalam pembangunan pertanian di kabupaten Jember.



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. subsektor peternakan, subsektor perkebunan, dan subsektor perikanan merupakan prioritas pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Jember pada tahun 1999;
2. prioritas pembangunan sektor pertanian Kabupaten Jember di masa datang (2000-2004) adalah subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan;
3. subsektor dominan dalam pembentukan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Jember tahun pada 1995-1999 adalah subsektor tanaman pangan dan sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jember tahun 1995-1999.

### 5.2 Saran

Simpulan yang diambil dapat dijadikan sebagai dasar bagi saran-saran yang akan diberikan yaitu sebagai berikut :

1. sektor pertanian di Kabupaten Jember perlu dipacu pertumbuhannya karena perannya yang dominan bagi peningkatan pendapatan daerah dan petani khususnya, begitu pula subsektor tanaman pangan sebagai subsektor yang memberi kontribusi paling besar bagi sektor pertanian, karena dengan pertumbuhan yang tinggi akan menjadikan sektor dan subsektor ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor dan subsektor sejenis yang ada di Propinsi Jawa Timur , sehingga dapat dijadikan sektor pemimpin (*leading sector*) bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember dimasa datang (2000-2004);
2. subsektor peternakan, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor pemimpin pembangunan ekonomi pertanian di Kabupaten Jember di masa datang (2000-

2004) berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena itu pengembangan ketiga subsektor ini harus diimbangi dengan keterkaitan kemuka (*forward linkage*) maupun kebelakang (*backward linkage*) antara ketiga subsektor ini dengan sektor atau subsektor yang lain.



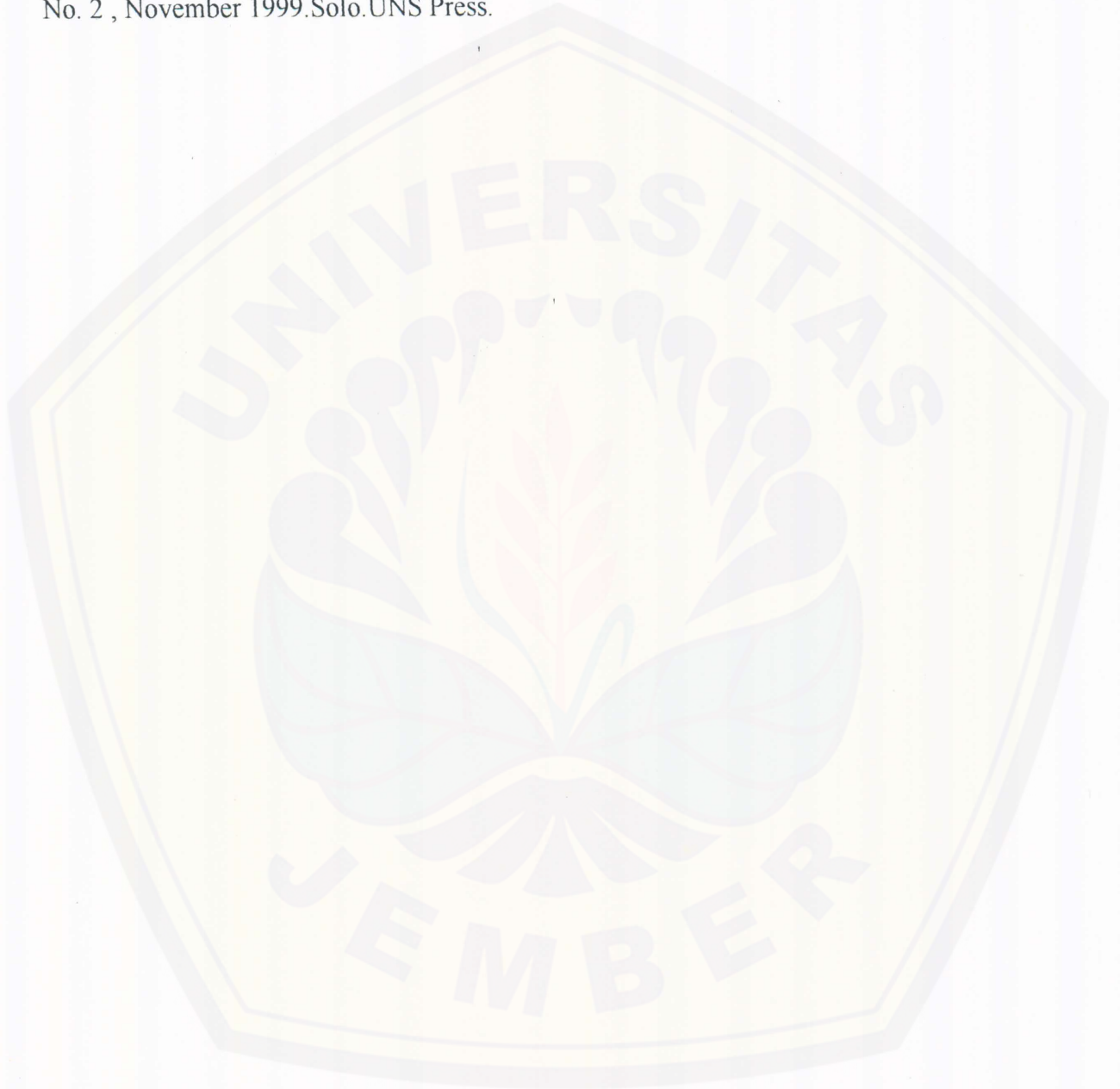


## DAFTAR PUSTAKA

- Bapedda Kalimantan Barat, 1992. *Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Kalimantan Barat: Fakta dan Analisa*. Pontianak. Bapedda Kalimantan Barat.
- Aziz, IJ. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta PPFÉ-UI.
- Dirjen Depdiknas RI, 1993. *Bahan Penataran P4 untuk Mahasiswa*. Jakarta. Dirjen Depdiknas RI.
- Glasson, J. 1987. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: LPFE-UI.
- Hasibuan, N. 1999. *Kelembagaan Pendukung Bagi Pengembangan Agribisnis dibidang Tanaman Pangan dan Holtikultura. dalam Refleksi Pertanian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kantor Statistik Kabupaten Jember. 1999a. *Jember dalam Angka*. Jember: Kantor Statistik Jember.
- , 1999b. *PDRB Kabupaten Jember*. Jember: Kantor Statistik Jember.
- Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur. 1999. *Jawa Timur dalam Angka*. Surabaya: Kantor Statistik Jawa Timur.
- Pabelan, 1998. *GBHN 1998, Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VIII*. Jakarta. Pabelan
- Partadiredja, A. 1986. *Analisis Pendapatan Nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Putra, A. 1999. *Keunggulan Komparatif Pertanian Indonesia*. Artikel dalam *Jurnal Bisnis, Ekonomi dan Politik* Oktober 1999. Jakarta. LP3ES
- Grafika Press, 2001. *Evaluasi Ekonomi Indonesia Tahun 2000 dan prospeknya Tahun 2001*. Artikel dalam *Jurnal Pasar Modal Indonesia*. Januari 2001. Jakarta. Grafika Press
- Sevilla, 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta. UI Press.
- Soekartawi. 1996. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Rajawali Pers

Wibowo,1999. *Tantangan dan Strategi Pembangunan Pertanian*. Artikel dalam *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Politik* November 1999.Jakarta.LP3ES

Yuwono, P. 1999. *Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapai Implementasi UU No. 22/1999 (Studi Kasus Kotamadya Salatiga)*. Artikel dalam *Jurnal Kritis* Vol. XII No. 2 , November 1999.Solo.UNS Press.





Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999 (Dalam Juta Rupiah).

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	977.070,77	1.111.810,87	991.547,77	847.647,97	881.730,32
1.1 Tanaman Pangan	430.136,44	485.928,84	440.938,70	443.551,23	478.133,76
1.2 Perkebunan	276.499,20	313.931,87	288.037,01	173.739,68	168.388,26
1.3 Peternakan	225.443,44	260.940,67	227.469,22	195.812,78	199.694,83
1.4 Kehutanan	10.402,47	11.090,80	5.679,49	5.438,97	5.925,82
1.5 Perikanan	34.588,22	39.918,49	29.423,35	29.105,31	29.587,65
PDRB	2.211.734,91	2.552.859,08	2.269.330,52	2.097.376,00	2.136.985,25

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a, diolah, Februari 2001

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993 di Propinsi Jawa Timur Tahun 1995-1999 (Dalam Juta Rupiah).

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	9.866.092,04	10.253.902,4	10.360.819,6	9.840.471,06	10.004.104,0
1.1 Tanaman Pangan	6.337.720,90	6.590805,73	6.431.044,49	6.448.069,42	6.693.479,92
1.2 Perkebunan	1.614.700,21	1.837.421,94	1.992.634,24	1.527.057,75	1.491.946,28
1.3 Peternakan	999.383,91	941.224,07	1.011884,61	883.726,90	901.457,88
1.4 Kehutanan	262.955,72	266.103,35	259.298,47	233.168,31	232.029,85
1.5 Perikanan	651.331,89	618.344,29	665.960,82	748.448,67	685.190,44
PDRB	57.040.503,9	61.752.469,0	64.853.575,9	54.398.896,7	55.038.126,6

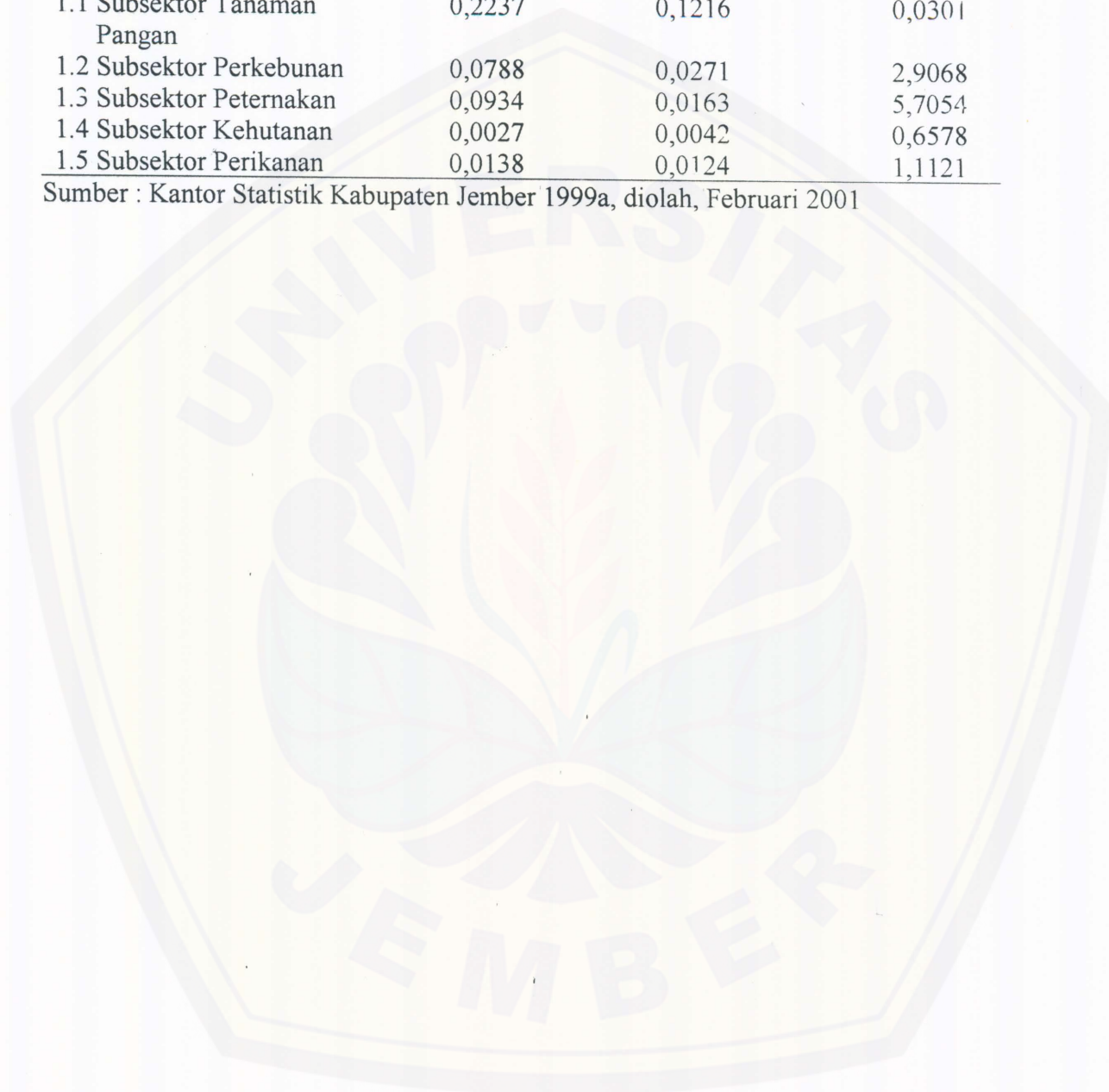
Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a, diolah, Februari 2001



Lampiran 3. Perhitungan LQ Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Menurut Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1995-1999.

Lapangan Usaha	VRi/VR	Vi/V	LQ
1. Sektor Pertanian	0,4126	0,1818	2,2700
1.1 Subsektor Tanaman Pangan	0,2237	0,1216	0,0301
1.2 Subsektor Perkebunan	0,0788	0,0271	2,9068
1.3 Subsektor Peternakan	0,0934	0,0163	5,7054
1.4 Subsektor Kehutanan	0,0027	0,0042	0,6578
1.5 Subsektor Perikanan	0,0138	0,0124	1,1121

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a, diolah, Februari 2001



Lampiran 4. Persentase Pertumbuhan Tahun ke Tahun PDRB Sektor dan Subsektor - Subsektor Pertanian Menurut Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
1. Sektor Pertanian	9,6259	8,4160	19,2667	-14,5126	4,0208
1.1 Subsektor Tanaman Pangan	9,2461	9,0634	0,4285	0,5925	7,7967
1.2 Subsektor Perkebunan	8,1532	8,7020	1,1857	-0,3968	-3,0801
1.3 Subsektor Peternakan	11,4667	6,2389	5,1042	-13,9168	1,0825
1.4 Subsektor Kehutanan	14,8468	5,5743	-20,8856	-4,2349	8,9511
1.5 Subsektor Perikanan	16,3634	14,1138	15,4557	-1,0809	1,6572
PDRB TOTAL	20,2942	-1,8554	4,5438	-7,5773	1.8886

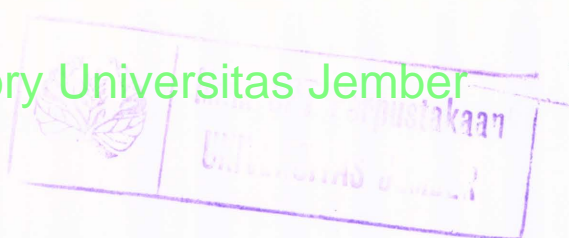
Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a, diolah, Februari 2001



Lampiran 5. Persentase Pertumbuhan Tahun ke Tahun PDRB Sektor dan Subsektor  
-Subsektor Pertanian Menurut Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten  
Jember Tahun 1995-1999

<b>Lapangan Usaha</b>	1995	1996	1997	1998	1999
1. Sektor Pertanian	2,0695	3,7482	1,2203	-5,0223	1,5629
1.1 Subsektor Tanaman Pangan	4,2726	3,9933	-2,4240	31,3639	-20,7691
1.2 Subsektor Perkebunan	-1,6025	13,7936	8,4469	-23,3648	-2,2993
1.3 Subsektor Peternakan	2,4488	-5,8196	7,5073	-12,6653	2,0064
1.4 Subsektor Kehutanan	-0,8431	11,9702	-2,5572	-10,0773	-0,4883
1.5 Subsektor Perikanan	-7,8262	-5,0646	7,7001	12,3863	-8,4520
<b>PDRB TOTAL</b>	<b>8,1798</b>	<b>8,2607</b>	<b>5,0218</b>	<b>-16,1204</b>	<b>1,1750</b>

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a, diolah, Februari 2001



Lampiran 6. Perhitungan DLQ Sektor dan Subsektor-Subsektor Pertanian Menurut Harga Konstan Tahun 1993 di Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Tahun 1995-1999.

Lapangan Usaha	$g_{i+1}/g_i + 1$	$G_{i+1}/G + 1$	DLQ
1. Sektor Pertanian	0,9849	0,9944	0,9904
1.1 Subsektor Tanaman Pangan	0,9666	1,0196	0,9480
1.2 Subsektor Perkebunan	0,9188	0,9772	0,9402
1.3 Subsektor Peternakan	0,9876	0,9743	1,0137
1.4 Subsektor Kehutanan	0,9749	0,9619	1,0134
1.5 Subsektor Perikanan	1,0565	0,9847	1,0729

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember 1999a, diolah, Februari 2001

